



ISSN No. 2088-2815
No. 7, Tahun 2014

GOVERNANCE

Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat

1. BUDAYA POLITIK DI INDONESIA (suatu telaah tentang perkembangan budaya politik partisipan sejak kemerdekaan sampai dengan era reformasi) Oleh: T. A. M. Ronny Gosal
2. PELUANG DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN. Oleh: T. A. M. Ronny Gosal
3. HUBUNGAN ANTARA EFEKTIVITAS APARAT PEMERINTAH DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KELURAHAN MALALAYANG I KECAMATAN MALALAYANG. Oleh: Marlien T. Lopian
4. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN TALAWAAN KABUPATEN MINAHASA UTARA. Oleh: Mondekal Pinatik
5. KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN TUGAS PENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA POOPO KECAMATAN RANOTIAPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN. Oleh: HIZKIA SARAYAR
6. PERANANAN KEPEMIMPINAN HUKUM TUA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA DI DESA PAKUURE KINAMANG KECAMATAN TENGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN. Oleh: JELLY MAMANGKEY
7. PERILAKU BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS TATA KOTA KOTAMUBAGU. Oleh: Reonald Steven Maabuut
8. KONFLIK PENEMPATAN PEMIMPIN DI DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS SOSIAL DI KABUPATEN LANNY JAYA. Oleh: MAIKEL YIGIBALOM
9. PERAN MASYARAKAT DALAM MENGAWASI KINERJA APARATUR KELURAHAN TINGKULU KECAMATAN WANEA. Oleh: Timothy Gabriel Baptis Lumapow
10. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KELURAHAN KAKENTURAN DUA KECAMATAN MAESA KOTA BITUNG. Oleh: FRENNY RUMUAT
11. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI. Oleh: RENALTO TUMARAH
12. EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN (STUDI TENTANG PELAYANAN PEMBUATAN KTP DI KELURAHAN MANEMBO NEMBO ATAS, KECAMATAN MATUARI, KOTA BITUNG. Oleh: LIDYA CHRISTINE MONTUNG
13. PERAN MASYARAKAT DALAM MENGAWASI KINERJA PERANGKAT KELURAHAN REREWOKAN KECAMATAN TONDANO BARAT KABUPATEN MINAHASA. Oleh: JULIO ARUPERES
14. Kinerja Birokrasi Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik. Oleh: INBRA MEREV WAANI
15. PERAN KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI (STUDI KASUS DI KANTOR KECAMATAN AMURANG BARAT). Oleh: Jimmy Langkay
16. KEPEMIMPINAN CAMAT TAHUNA TIMUR DALAM MENINGKATKAN PERANSERTA MASYARAKAT UNTUK MENUNJANG KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. Oleh: ZULFIKRAM HARAS
17. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN (E. KTP) DI DISTRIK URFAS KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2013 (Suatu Studi di Kantor Distrik Urfas Kabupaten Waropen Provinsi



9 772088 281985

GOVERNANCE

NO. 7 TAHUN III, 2014

Pelindung

DEKAN FISIP UNSRAT
Drs. Philep Regar, MSi

Penanggung Jawab
Dra Marlien Lapijan MSi

Pemimpin Redaksi
DR. Michael Mementu, MA

Sekretaris Redaksi
Neni Kumayas, SIP, MA

Dewan Redaksi
Drs Burhan Niode MA
DR. Daud M. Liando, S.Sos, MSi
Donald Monintja, S.Sos, MSi
Neni Kumayas, SIP, MA
Dra. Daisy Posumah, MIA
Drs Johnly Pangemanan, MSi

Sekretariat :
Alfons Kimbal S.Sos, MSi
Trintje Lambey, SIP, MSi

Lay Out & Sirkulasi
Ardiles Mewoh SIP, MSi
Maxi Egetan SIP, MSi
Frangky Rengkung, SIP

Alamat
Jl. Kampus Bahu 95115
Telp. 0431-862586
Email. governance.unsrat@gmail.com

1. BUDAYA POLITIK DI INDONESIA (suatu telaah tentang perkembangan budaya politik partisipan sejak kemerdekaan sampai dengan era reformasi). Oleh: T. A. M. Ronny Gosal
2. PELUANG DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN. Oleh: T. A. M. Ronny Gosal
3. HUBUNGAN ANTARA EFEKTIVITAS APARAT PEMERINTAH DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KELURAHAN MALALAYANG I KECAMATAN MALALAYANG. Oleh : Marlien T. Lapijan
4. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN TALAWAAN KABUPATEN MINAHASA UTARA. Oleh : Mardekai Pinatik
5. KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN TUGAS PENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT DIDESA POPOO KECAMATAN RANIOAPO KABUPATEN MINAHASA SELATAN. Oleh : HIZKIA SARAYAR
6. PERANAN KEPEMIMPINAN HUKUM TUA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA DI DESA PAKUURE KINAMANG KECAMATAN TENGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN . Oleh : JELLY MAMANGKEY
7. PERILAKU BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS TATA KOTA KOTAMUBAGU. Oleh : Reonald Steven Maabuut
8. KONFLIK PENEMPATAN PEMIMPIN DI DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS SOSIAL DI KABUPATEN LANNY JAYA. Oleh : MAIKEL YIGIBALOM
9. PERAN MASYARAKAT DALAM MENGAWASI KINERJA APARATUR KELURAHAN TINGKULU KECAMATAN WANEA. Oleh : Timothy Gabriel Baptis Lumapow
10. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KELURAHAN KAKENTURAN DUA KECAMATAN MAESA KOTA BITUNG. Oleh : FRENNY RUMUAT
11. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPII DALAM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI. Oleh : RENALTO TUMARAH
12. EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN (STUDI TENTANG PELAYANAN PEMBUATAN KTP DI KELURAHAN MANEMBO-NEEMBO ATAS, KECAMATAN MATUARI, KOTA BITUNG. Oleh : LIDYA CHRISTINE MONTUNG
13. PERAN MASYARAKAT DALAM MENGAWASI KINERJA PERANGKAT KELURAHAN REREWOKAN KECAMATAN TONDANO BARAT KABUPATEN MINAHASA. Oleh : JULIO ARUPERES
14. Kinerja Birokrasi Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik. Oleh : INDRA MEREV WAANI
15. PERAN KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI (STUDI KASUS DIKANTOR KECAMATAN AMURANG BARAT). Oleh : Jimmy Langkay
16. KEPEMIMPINAN CAMAT TAHUNA TIMUR DALAM MENINGKATKAN PERANSERTA MASYARAKAT UNTUK MENUNJANG KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. Oleh : ZULFIHKRAM HARAS.
17. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN (E.KTP) DI DISTRIK URFAS KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2013 (Suatu Studi di Kantor Distrik Urfas Kabupaten Waropen Provinsi Papua). Oleh : YUSTINUS SAPARI



Pengantar Redaksi

Kali ini Jurnal Ilmiah Governance tampil dengan tulisan yang melibatkan mahasiswa yang telah menyelesaikan penulisan studi akhir yakni Skripsi dan Tesis. Keterlibatan mahasiswa dalam rangka membuat lulusan perguruan tinggi lebih berkualitas dan menghasilkan karya tulisan yang bisa diakses oleh publik atau dipublikasikan. Mengingat juga negeri ini masih kekurangan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku atau jurnal, dibandingkan dengan beberapa negara yang setara dengan Indonesia. Oleh karena itu Jurnal Governance memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menghasilkan karya yang terpublikasi.

Kesempatan kali ini jurnal governance menghasilkan karya-karya pemikiran intelektual, produk perguruan tinggi. Berbagai hal menyangkut politik pemerintahan dibahas dalam tulisan-tulisan jurnal ini. Sekiranya semua dapat bermanfaat dalam membangun bangsa dan negara tercinta ini.

Semoga pembaca mendapat manfaat dari Jurnal ini

Sambutan DEKAN FISIP Unsrat

Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan melalui undang-undang berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989. Mengenai Dasar, Fungsi, dan Tujuan dari Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Seangkan tujuan Pendidikan Nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Semua yang tersirat dalam Dasar, Fungsi dan Tujuan Pembangunan Nasional ini adalah visi yang perlu digapai oleh institusi Universitas Sam Ratulangi, khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat sebagai bagian dari komponen utama Universitas Sam Ratulangi dalam menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya, apalagi era globalisasi dan keberadaan Sulut strategis di pasifik sangat membutuhkan SDM yang dapat mengembangkan potensi unggulnya. Karena ini bagaimana kita melakukan cara-cara yang tepat untuk membentuk peserta didik yang berhasil guna.

Dalam rangka itu, kualitas tenaga akademiknya harus selalu diberdayakan agar dapat membina mahasiswa dengan baik. Jurnal Ilmiah Governance Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat ini adalah salah satu wadah yang tepat mengasah ketajaman sumber daya tenaga akademik di lingkungan FISIP Unsrat. Seyogyanya Jurnal ini dapat dimanfaatkan dengan baik.

Dekan,

Drs. Philep M. Regar, MSi

SAMBUTAN
KETUA JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNSRAT

Tradisi akademis yang baik adalah bagaimana kita mengembangkan kebiasaan berdiskusi, meneliti dan menulis. Kebiasaan ini harus berjalan terus menerus yang nantinya bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran brilian bagi kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Karena itu para akademisi di Universitas Ratulangi khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat dituntut untuk dapat berusaha selalu meningkatkan kemampuan sumber dayanya dalam menghasilkan karya-karya hasil analisisnya terhadap persoalan-persoalan politik pemerintahan di sekitar kita. Media Jurnal Governance yang terbit secara berkala ini adalah wadah yang membantu para akademisi menuangkan karya-karya pikirnya dengan metode ilmiah.

Semoga segenap akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat sebagai ilmuwan yang sangat diharapkan, untuk dapat menulis karya ilmiah yang produktif.

Ketua Jurusan,

Dra. Marlien Lopian, MSi

HUBUNGAN ANTARA EFEKTIFITAS APARAT PEMERINTAH DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KELURAHAN MALALAYANG I KECAMATAN MALALAYANG

Oleh:
Marlien T. Lapijan

The skill of government's apparatus to application control increasing in a efficient and effective impossible can increased without increasing human quality in that self bureaucracy. This research direction to identification connection between effectiveness government's apparatus with society participation. Population in this research is the whole society Malalayang I village Malalayang Subdistrict. The total of head family are 80 KK, the total sample in this research are 80 head family. A sample technique to use in this research are proportional random sampling. For interpretation primer data used research instrument are cusioner with interview technique. The analysis used in this research, is presentation analysis, chi-square analysis test, coefficient analysis contingency. Effectiveness government's apparatus village in realization the task, the real have significant connection to society participation in the implementation increasing in their village. The think showed by the result statistic testing chi square and coefficient contingency where coefficient the connection is 0,5752 more big than ½ coefficient maximum 0,8043 in the level significant 0,01 or believe level 99%.

Keywords : effectiveness government's apparatus, participation society

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk melaksanakan tujuan nasional yang terkandung dalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pelaksanaan Pembangunan Nasional, tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi birokrasi dan aparatur pemerintahnya. Kedudukan aparatur pemerintah dalam Pembangunan Nasional pada lingkup pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah adalah menempati posisi yang strategis, apalagi aparatur pemerintah daerah yang merupakan ujung tombak pembangunan nasional dimana lebih dekat dan langsung berhubungan dengan partisipasi masyarakat, tentunya semakin strategis kedudukannya. Dengan posisi strategis ini maka aparat pemerintah selaku komponen penyelenggara Negara senantiasa dituntut pengabdian dan kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Aparatur pemerintah sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang hidup ditengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menjalankan, roda pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif, bersih, berwibawa yang dilandasi semangat pengabdian yang tinggi kepada masyarakat, kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berkeadilan yang mampu memberikan pelayanan yang maksimal dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan hati nurani dan aspirasi rakyat, serta diupayakan penataan kewenangan yang rasional diantara jajaran perangkat aparatur yang mengarah pada pelaksanaan birokrasi yang professional.

Harus disadari bahwa sebelum pembangunan yang berorientasi pada partisipasi masyarakat dipacu, terlebih dahulu dilakukan penataan dan pembinaan birokrasi dan aparaturnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang berkualitas dan berkemampuan tinggi.

Seperti yang dikemukakan oleh Silalahi(1998) aparatur Negara merupakan bagian dari sumber daya manusia Indonesia, harus dijadikan prioritas utama untuk ditingkatka, agar secara sinergik masyarakat dapat berpartisipasi melakukan pembangunan. Menyadari kedudukan aparat pemerintah yang demikian penting, maka usaha

peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat harus lebih diupayakan lagi. Untuk itu wajarlah apabila memasuki era reformasi dan otonomi daerah lebih diupayakan peningkatan efektifitas dan kualitas kerja aparat pemerintah.

Menurut Widjadja (1991) mengatakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dengan hasil semaksimal mungkin maka pembinaan aparat pemerintah diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna. Oleh karena itu, dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkualitas dengan keterlibatan masyarakat, sangat tergantung efektifitas aparat pemerintah.

Lebih lanjut Widjadja (1991) mengharapkan bahwa aparat pemerintah dapat menjadi antara lain yaitu : aparat pemerintah wajib mengabdikan kepada kepentingan umum; aparat pemerintah adalah penggerak bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; aparat pemerintah harus berdiri ditengah-tengah (netral) bersikap terbuka dan tidak memihak; aparat pemerintah harus jujur, bersih dan berwibawa; aparat pemerintah harus bijaksana dan sebagai pengayom.

Dominasi peranan aparat pemerintah yang memiliki fungsi sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara mengacu pada peran sebagai pelaksana kebijaksanaan pemerintah. Dalam peranan ini lembaga birokrasi menjadi ajang bertemunya kegiatan administrative dan ketatanegaraan. Aparatur pemerintah sebagai orang-orang yang menduduki jabatandalam kelembagaan Negara senantiasa menjadi aparat yang fungsional untuk mewujudkan sosok masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Dalam rangka menggiatkan partisipasi dalam pembangunan perilaku aparat sebagai pelaksana administratif Negara senantiasa memahami aspirasi masyarakat dan peka terhadap masalah yang dihadapi masyarakat; membangun partisipasi masyarakat, membantu memecahkan masalah yang tidak dapat dihadapi masyarakat; membuka dialog dengan masyarakat dalam arti keterbukaan dan harus mampu menciptakan instrumen dan peraturan yang memihak. Conyer dalam Soetomo (2006), mengemukakan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela yang didasari oleh determinan dan kesadaran diri masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat di bidang kesehatan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah kesehatan mereka sendiri. Di dalam hal ini, masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program kesehatan masyarakatnya. Institusi kesehatan hanya sekedar memotivasi dan membimbingnya (Notoatmodjo, 2007).

Menurut Undang-Undang No.43 Tahun 1999, aparat pemerintah sebagai pelaksana pencapaian tujuan nasional

dalam mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, peradaban yang modern, makmur, adil serta juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945. Berangkat dari kebijakan pemerintah telah membuat suatu garis kerja kepada aparat pemerintah untuk memberi motivasi pelayanan secara efisien dan efektif.

Efektifitas kerja aparat pemerintah senantiasa ditopang dengan sikap netral dan objektif dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai instrumen dan sepenuhnya menjauhi kepentingan umum yang bersikap langgeng secara eksplisit ditetapkan dalam konstitusi dalam rangka melakukan pelayanan administrasi kepada masyarakat, melakukan pembagian kerja yang telah ditetapkan serta kemampuan menggunakan fasilitas kerja secara efisien dan efektif. Aparat pemerintah adalah satu-satunya organisasi yang mungkin dapat mengakses penguasaan atas seluruh sumber-sumber nasional. Oleh karena itu, pada umumnya pemerintah dengan aparatnya memiliki lebih banyak kemampuan untuk melaksanakan pembangunan daripada organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Pembangunan sebagai proses perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia membutuhkan "agent of change" yang benar-benar memiliki potensi dan sumber daya yang besar untuk memberi motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan/kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat" (Sedarmayanti, 2001)

Kemampuan aparat pemerintah untuk melaksanakan tugas pembangunan secara efisien dan efektif tidak mungkin dapat ditingkatkan tanpa peningkatan kualitas manusia dalam birokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, kualitas yang diperlukan oleh aparat pemerintah terhadap pembangunan mencakup ketaatan pada prinsip moral dan agama yang tinggi, jasa kesetiakawanan sosial dalam hubungan sebagai pejabat dan masyarakat, rasionalitas sebagai aparat yang merupakan individu organisasi dan institusi yang lebih mementingkan tujuan pembangunan serta kemandirian yang tinggi dalam mencapai efektifitas pelaksanaan pemerintahan (Widjadja, 1991).

Prasurvey dilapangan menunjukkan aparat pemerintah di Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang di duga belum menunjukkan maksimalisasi peran sebagai aparat yang profesional, maka wajarlah kalau masih terdapat beberapa kelemahan pada sector pembangunan, terutama dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, maka pemerintah daerah pada umumnya serta pemerintah Kelurahan Malalayang I khususnya diharapkan untuk senantiasa mengupayakan peningkatan kemampuan birokrasi dalam melaksanakan tugasnya sehingga efektifitas dapat dicapai, dan memungkinkan partisipasi masyarakat dapat bertumbuh

Selain itu disadari wilayah Kelurahan Malalayang

I Kecamatan Malayang memiliki potensi dan sumber daya masyarakat yang cukup besar yang kesemuanya itu merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan daerah. Namun permasalahannya ialah bahwa keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada tingkat efektifitas aparat pemerintah dan partisipasi.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai efektifitas aparat pemerintah dan partisipasi masyarakat Kelurahan Malayang I Kecamatan Malayang maka perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut apakah benar bahwa efektifitas aparat pemerintah punya hubungan dengan peningkatan partisipasi masyarakat di Kelurahan Malayang I Kecamatan Malayang. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam memasuki otonomi daerah, era globalisasi dan era informasi dibutuhkan peningkatan kemampuan secara efisien dan efektif bagi aparat pemerintah serta juga memberdayakan partisipasi masyarakat sebagai modal dasar dalam pembangunan. Dalam strategi pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah sebagai bagian dari sumber daya memegang peranan penting dalam kedudukannya sebagai alat pemikir, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan nasional untuk dibutuhkan sosok aparat yang memiliki kemampuan dalam menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan dan jiwa partisipasi masyarakat yang tinggi dan merasa terbeban akan pembangunan. Oleh karena itu, usaha peningkatan efektifitas kerja aparat pemerintah merupakan suatu hal harus dilaksanakan agar aparat pemerintah dapat menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan dapat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan yang berkembang di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variable yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Efektifitas Aparat Pemerintah, adalah pengukuran terhadap keberhasilan para aparat pemerintah kelurahan didalam melaksanakan tugas sehari-hari mereka, terutama yang menyangkut pembangunan di kelurahan. Indikator-indikator pengukuran adalah sebagai berikut : Keberhasilan melaksanakan tugas sesuai jumlah atau banyaknya tugas yang ditetapkan dalam periode waktu tertentu; Keberhasilan melaksanakan tugas sesuai dengan mutu yang diinginkan; Keberhasilan didalam merespon dinamika masyarakat secara cepat; Keberhasilan memberikan bimbingan, pengarahan dan dorongan kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat didalam implementasi program-program pembangunan dikelurahan, baik yang ditetapkan bersama oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Variabel ini dapat diukur dari : Keikutsertaan dalam memberikan sumbangan pemikiran suatu program yang telah ditetapkan; Keterlibatan dalam memberikan bantuan dana ataupun material

seperti bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program

Keikutsertaan dalam kelompok-kelompok kerja yang ditetapkan untuk pelaksanaan program.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh warga masyarakat Kelurahan Malayang I Kecamatan Malayang. Jumlah kepala keluarga sebanyak 811 KK, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 kepala keluarga. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah proportional random sampling.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengambilan data primer digunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dan disertai dengan teknik wawancara. Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara penelitian documenter yaitu, memeriksa/ menelaah data yang telah ada di kantor lokasi penelitian.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Analisa Presentase, digunakan untuk mendeskripsikan tentang variabel efektifitas aparat pemerintah kelurahan dan variabel partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Rumusnya :

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Analisa chi-square test, teknik ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kebijakan pemerintah dengan partisipasi masyarakat. Analisis chi-square menggunakan rumus :

$$X^2 = \frac{(f_o - f_h)^2}{f_h}$$

(Sutrisno Hadi, 2002)

Analisa koefisien kontigensi, digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara kedua variable dengan menggunakan rumus :

$$KK = \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + n}}$$

Aturan keputusan penerimaan, hipotesis yang akan diuji pada taraf uji 1 % atau 0.01. namun bila ternyata tidak teruji maka akan diuji pada taraf 5% atau 0.05. jika hasil penelitian nanti berada lebih kecil dari taraf signifikan maka hipotesis ditolak. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat keerat hubungan, maka harga KK dikonsultasikan dengan harga maksimum koefisien kontigensi yang diperoleh dengan rumus :

$$KK_{\max} = \sqrt{\frac{(K-1)}{K}}$$

HASIL DAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

Efektifitas Aparat Pemerintah

Berdasarkan tabulasi data menunjukkan 32,50% responden menilai Efektifitas Aparat kelurahan mereka tinggi, 45,00% menilai sedang, dan sisanya 22,50% menilai rendah. Jelas terlihat bahwa penilaian responde tentang Efektifitas Aparat Pemerintah, dalam melaksanakan tugas ternyata bervariasi, akan tetapi yang lebih banyak

adalah yang menilai sudah pada kategori sedang dan tinggi, sedang yang menilai rendah hanya sebagian kecil saja. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pada umumnya aparat pemerintah Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang telah dapat melaksanakan tugas sehari-hari mereka dengan cukup efektif.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Hasil analisa presentase menunjukkan bahwa 20.00% responden yang dilibatkan pada penelitian ini adalah yang tingkat partisipasinya dalam implementasi program-program pembangunan dikelurahan berkategori tinggi, kemudian 20.00% yang terkategori partisipasi sedang, dan sisanya 50% adalah tingkat partisipasi mereka pada kategori rendah

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa dilihat dari derajat atau tingkat partisipasi dalam pembangunan ternyata bervariasi, akan tetapi yang lebih dominan adalah partisipasinya rendah.

Pembahasan

Dari hasil analisis presentase diperoleh gambaran bahwa tingkat efektifitas aparat pemerintah kelurahan dalam melaksanakan tugas sehari-hari mereka pada umumnya sudah cukup tinggi. Demikian pula, dilain pihak diperoleh gambaran bahwa tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam implementasi program-program pembangunan dikelurahan mereka, ternyata mempunyai hubungan yang cukup tinggi dan signifikan dan meyakinkan pada taraf uji 1% atau taraf kepercayaan 99%. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien kontigensi yang didapat yaitu sebesar 0.5752 yang cenderung mendekati nilai koefisien kontigensi maksimum (0.8165) atau lebih besar dari nilai $\frac{1}{2}$ koefisien kontigensi maksimum (0.4083), dengan taraf signifikansi sebesar 0.01.

Dengan demikian, penelitian ini dapat membuktikan bahwa efektifitas aparat pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari mereka, ternyata berhubungan erat terhadap partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan dikelurahan mereka. Oleh karena itu, dapatlah dinyatakan bahwa hipotesis dapat diterima secara sangat meyakinkan kebenarannya.

Dengan terujinya hipotesis tersebut maka secara sekaligus penelitian ini dapat membuktikan bahwa efektifitas aparat pemerintah kelurahan dalam menjalankan tugas sehari-hari mereka, turut menentukan partisipasi masyarakatnya dalam implementasi program-program pembangunan yang ditetapkan. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang ditetapkan adalah turut tergantung pada tingkat efektifitas aparat pemerintah kelurahan dalam melaksanakan tugas sehari-hari mereka. Artinya semakin efektif para aparat pemerintah kelurahan dalam melaksanakan tugas maka ternyata semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program-program pembangunan yang ditetapkan.

Bedasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat dikatakan bahwa efektifitas aparat kelurahan dalam melak-

sanakan tugas adalah merupakan salah satu penggerak atau pendorong bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan di kelurahan yang bersangkutan. Ini semua menunjukkan bahwa peranan pemerintah sebagai motivator partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih sangat diperlukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Aparat pemerintah yang berpera menggali, menggerakkan, mengarahkan, masyarakat dalam berpartisipasi melaksanakan pembangunan sehingga efektifitas aparat pemerintah sangat berpengaruh terhadap tinggi-rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan

Efektifitas aparat pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan tugas, ternyata mempunyai hubungan yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam implementasinya program pembangunan di kelurahan mereka. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil pengujian statistic chi-square dan koefisien kontigensi dimana koefisien hubungannya adalah sebesar 0,5752 lebih besar dari $\frac{1}{2}$ koefisien kontigensi maksimum 0.4083 pada taraf signifikansi 0.01 atau taraf kepercayaan 99%

Saran

Atas pertimbangan hasil penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

Efektifitas aparat pemerintah kelurahan dalam menjalankan tugas sehari-hari, masih perlu ditingkatkan mengingat permasalahan yang muncul dalam masyarakat sekarang ini semakin kompleks dan memerlukan penanganan yang efektif oleh pemerintah kelurahan.

Partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan juga perlu ditingkatkan mengingat keterbatasan anggaran/ dana yang disediakan oleh pemerintah guna membiayai program pembangunan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Notoatmodjo, S. 2007. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sedarmayanti. 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju.
- Silalahi, T.B. 1998. Pemberdayaan Birokrasi dalam Pembangunan. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Soetomo. 2006, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka
- Widjaja, A. (1991). Etika Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumber lain
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Niomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.